

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KURATOR ATAS
TINDAKANNYA YANG MENGGELAPKAN BUDEL PAILIT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)**

Duarjon Simalango *
Dr. Marzuki, S.H., M.Hum**
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H***

ABSTRAK

Kewenangan Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan Kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit, bagaimana perlindungan hukum terhadap Kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit, bagaimana pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST

Metode penulisan menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. Jenis data penelitian ini adalah normatif. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kewenangan kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Perlindungan hukum terhadap kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit menghadapi debitor pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator.

Hasil penelitian tesis ini adalah penulis tidak sependapat dengan putusan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST yang menghukum kedua kurator tersebut dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara. Menurut hemat penulis, kelalaian yang dilakukan kurator saat melakukan pemberesan budel pailit tidak dapat dituntut secara pidana karena perbuatan kurator tersebut dilindungi UU Nomor 37 Tahun 2004. Apabila karena kelalaian kurator mengakibatkan kerugian bagi kreditor maupun debitor maka kurator tersebut dapat digugat secara perdata untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan kelalaian kurator tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kurator,Pailit.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**CRIMINAL LIABILITY BY THE CURATOR FOR HIS ACTIONS
EMBEZZLING BANKRUPT BUDEL
(Case Study of Central Jakarta District Court Decision Number
2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)**

Duarjon Simalango *
Dr. Marzuki, S.H., M.Hum**
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H***

ABSTRACT

The Curator's authority is to manage and/or settle bankrupt assets. The formulation of the problem in this thesis is what is the authority of the Curator over a company that has been declared bankrupt, how is the legal protection for the Curator of a company that has been declared bankrupt, how is the judge's consideration of criminal acts committed by the curator in deciding Case Number: 2081/Pid.B/2011/ PN. JKT. PST

The writing of this thesis uses the method of library research (library research) to examine secondary data by analyzing the case of the decision of the Central Jakarta District Court Number 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.

The curator's authority over a company that has been declared bankrupt is to manage or settle bankrupt assets and in carrying out its duties and authorities it is required to obtain approval from the supervisory judge. The task of settling, among other things, is to sell bankruptcy assets and the proceeds from the sale are distributed among creditors proportionally. Legal protection for curators of companies that have been declared bankrupt against bankrupt debtors, namely reporting to the police, based on the provisions described in Article 50 of the Criminal Code can be the basis for ensuring the implementation of the duties of the Curator.

The result of this thesis research is that the writer disagrees with the decision of Case Number: 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST which sentenced the two curators to 3 (three) years in prison. In the opinion of the author, the negligence committed by the curator when carrying out bankruptcy filings cannot be prosecuted criminally because the curator's actions are protected by Law Number 37 of 2004. caused by the negligence of the curator.

Keywords: Criminal Liability, Curator, Bankruptcy.

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervising Lecturer I of the Postgraduate Program in Law at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisory Lecturer II of the Postgraduate Program in Law at the Islamic University of North Sumatra*